

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan lapangan kerja di Indonesia mendorong para pekerja migran untuk mencari kesempatan kerja di luar negeri. Bagi mereka, bekerja di luar negeri menjadi solusi untuk mengatasi masalah perekonomian. Migrasi pekerja Indonesia ini diawali oleh banyaknya warga yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarga melalui pekerjaan di luar negeri. Namun, meskipun menghadapi banyak tantangan, mereka tetap memilih untuk bekerja di luar negeri. (Prianto 2019) Banyaknya permasalahan Pekerja Migran Indonesia, mendorong pemerintah membuat kebijakan perlindungan baik untuk pekerja migran yang di luar negeri maupun yang sudah purna majadi pekerja migran. Melalui UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU ini ditetapkan di Nasional dan setelah itu di turunkan ke Provinsi dengan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan akhirnya Menteri Ketenagakerjaan membuat sebuah permenaker Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (*Permenaker No. 2 Tahun 2019*, n.d.). Sebagai upaya untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan, serta memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran dan yang sudah purna di desa, program ini memanfaatkan potensi lokal tanpa mengabaikan karakteristik setempat.

Dikutip dari (Jurnal Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Republik 2019) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan dengan membentuk program yang disebut Desa Migran Produktif (Desmigratif) melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017. Namun, program ini kemudian dihapus dan dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Menurut pasal 1 angka 1 Kemenaker Nomor 59 Tahun 2017, desa migran produktif adalah. (Putri & Nugroho, n.d.)

“Desa yang Sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga PMI, memiliki

layanan bagi anak-anak PMI, melalui peran aktif Pemerintah Desa dalam melayani migrasi serta melibatkan pemangku kepentingan.” (Indonesia 2017).

Pemerintah Desa dan Desa Peduli Buruh Migran (Desmbumi) diharapkan menjadi pusat informasi dan komunikasi dalam kebijakan program desmigratif ini karena untuk keamanan penempatan dan perlindungan pekerja migran mulai dari awal menjadi pekerja migran hingga kembali ke daerah asal mereka. tujuannya untuk melindungi pekerja migran yang akan berangkat dan setelah bekerja di luar negeri serta perlindungan terhadap keluarganya.

Menjadi pekerja migran Indonesia memiliki aspek positif dan negatifnya. Beberapa keuntungannya meliputi gaji yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dengan berinteraksi dengan penduduk setempat, kesempatan untuk belajar bahasa di negara penempatan, dan mendapatkan pengalaman hidup yang berharga di luar negeri. Namun sisi buruknya mendapatkan perlakuan buruk, upah tidak sesuai dengan kontrak kerja. Dengan bertambahnya tahun Pekerja Migran semakin meningkat dan membuat pekerja migran sebagai salah satu penyumbang devisa ngara terbanyak, namun tidak semua pekerja migran bernasib baik, faktor keterbatasan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja di daerah asal mendorong calon pekerja migran untuk bekerja sebagai buruh migran untuk memperbaiki ekonomi keluarga, namun kenyatanya berbeda. Banyak perempuan pekerja migran mengalami penindasan, perbudakan, dan perlakuan tidak manusiawi dari majikan atau agen yang tidak bertanggung jawab dari negara asal mereka sendiri. Untuk membuat pekerja migran menjadi mandiri, pemberdayaan pekerja migran adalah cara untuk membuat mereka belajar bagaimana cara mengelolah ekonomi dan peluang kerja yang ada di desa agar pekerja migran menjadi semakin mandiri.

Kemandirian pekerja migran melibatkan kemampuan untuk berpikir secara mandiri, membuat keputusan, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa mengandalkan kekerasan. kemampuan psikomotorik, kognitif, dan konatif sambil memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa. dengan demikian, pekerja migran tersebut dapat menjadi mandiri. Pekerja migran akan secara bertahap memperoleh keterampilan dan kekuatan yang diharapkan dari pemberdayaan selama proses belajar. Seharusnya gambaran pembangunan sosial ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan ideal.

Wonoasri merupakan salah satu dari beberapa desa kantong pekerja migran Indonesia (PMI) di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Mulai tahun 2021 dan program desmigratif yang ada di Desa Wonoasri diusulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, desa ini telah ditetapkan sebagai Desa Migran Produktif. Mayoritas penduduk desa ini adalah pekerja migran. Desa ini memiliki Pemerintah Desa yang baik dalam mengurus keberangkatan dan kepulangan PMI, tidak hanya Pemerintah Desa, Desbumi juga baik dalam mengatur alur pendaftaran bagi calon pmi yang akan berangkat dan yang sudah purnah. Desbumi setiap hari mendata para PMI yang sudah purna maupun yang calon pekerja migran untuk menjalankan program desmigratif yang diberi tugas langsung oleh Kementrian Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Program Desmigratif, mengetahui kendala dalam pelaksanaan sebagai upaya mengurangi jumlah *non procedural*, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember, Pemerintah Desa dan Desbumi.

Permasalahannya adalah banyak pekerja migran setelah pulang dari negara penempatan masih bingung dengan kondisi sehari-hari karena mereka membutuhkan modal dan bimbingan agar ekonomi mereka dapat berkembang setelah pulang dan banyak anak pekerja migran yang terlantarkan karena kurang perhatian dari orang tua . Melalui Program Desmigratif ini, pekerja migran memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka selama berada di luar negeri. Pemerintah desa terus meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi pekerja migran. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya peran Pemerintah Desa dalam mendukung kemandirian ekonomi Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik melakukan penelitian atau kajian tentang **“Evaluasi Program Desmigratif (Desa Migran Produktif – Kementrian Ketenagakerjaan) Sebagai Bentuk Kemandirian Ekonomi Pekerja Migran Indonesia Di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusah Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas yang telah di uraikan, makan penulis ingin mengetahui permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Pemerintah Desa Wonoasri dan Desa Migran Produktif (Desbumi) dalam mendukung pelaksanaan Evaluasi Progam Desmigraif dalam bentuk kemandirian ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep dan Evaluasi Program Desmigratif sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pekerja Migran Indonesia
2. Menganalisis konsep dan Evaluasi Program Desmigratif sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pekerja Migran Indonesia
3. Mengukur efektivitas Program Desmigratif dalam mengurangi ketergantungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) pada pekerja migran serta meningkatkan akses mereka terhadap peluang ekonomi di Desa Wonoasri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Program Desmigratif dapat meningkatkan kemandirian ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan program tersebut. karena peraturan di Kabupaten Jember sedang dirancang, peneliti ingin memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Program Desmigratif sebagai bentuk kemandirian ekonomi Pekerja Migran Indonesia dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Kontribusi terhadap Kebijakan Publik: Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang Program Desmigratif untuk membantu Pekerja Migran menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan dapat membantu memperbaiki program dan menjadi tanggung jawab Kabupaten Jember sebagai Perancang Peraturan Daerah.
2. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Migran: Dengan memahami dampak Program Desmigratif, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan Kemandirian Pekerja Migran Indonesia. hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam program tersebut.
3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Jika Program Desmigratif berfokus pada pengembangan di desa, penelitian ini dapat menunjukkan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dan meningkatkan lapangan kerja.
4. Rekomendasi untuk peningkatan Program: Hasil penelitian ini dapat memberikan saran konkret tentang cara memperbaiki program desmigrasi,

seperti meningkatkan pelatihan ketrampilan dan mendukung usaha dalam strategi pemberdayaan masyarakat.

5. Pemahaman lebih mendalam tentang realitas Pekerja Migran: Penelitian ini dapat memberikan gambaran mendalam tentang kesulitan dan kesempatan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia dalam mencapai kemandirian finansial.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang baik tentang efektivitas program desmigratif dan memberikan dampak positif bagi pekerja migran

